

MANAJEMEN KURIKULUM PENDIDIKAN BERBASIS MILITER: ANALISIS DAN TANTANGANNYA

M. Anasrul Dwi Novriyansah¹, Yuniar², Afriantoni³
^{1,2,3} UIN Raden Fatah Palembang
anasruladijihara@gmail.com¹, yuniar_uin@radenfatah.ac.id²,
afriantoni_uin@radenfatah.ac.id³

ABSTRACT

Military-based education has long been implemented in certain institutions as a model that emphasizes discipline, responsibility, and leadership. However, the integration of military approaches into general education curriculum management remains a controversial discourse. This study aims to analyze the curriculum management model of military-based education and to identify the challenges faced in its implementation. This research employs a qualitative-descriptive approach through literature analysis and case studies of semi-military educational institutions. The findings indicate that the military approach can enhance discipline and the efficiency of curriculum implementation, but it also generates resistance concerning learning flexibility, students' rights, and pedagogical dynamics. Therefore, the implementation of this model requires adaptive strategies to align with the national education context.

Keywords: curriculum management, military-based education, discipline, pedagogical challenges

ABSTRAK

Pendidikan berbasis militer telah lama diterapkan dalam institusi tertentu sebagai model yang menekankan disiplin, tanggung jawab, dan kepemimpinan. Namun, integrasi pendekatan militer ke dalam manajemen kurikulum pendidikan umum masih menjadi wacana yang kontroversial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model manajemen kurikulum pendidikan berbasis militer, serta mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan analisis literatur dan studi kasus pada lembaga pendidikan semi-militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan militer dapat meningkatkan kedisiplinan dan efisiensi pelaksanaan kurikulum, namun juga menimbulkan resistensi terkait fleksibilitas pembelajaran, hak peserta didik, dan dinamika pedagogis. Oleh karena itu, implementasi model ini memerlukan strategi adaptif agar sesuai dengan konteks pendidikan nasional.

Kata kunci: manajemen kurikulum, pendidikan berbasis militer, kedisiplinan, tantangan pedagogis

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan instrumen strategis dalam membentuk

karakter dan kompetensi generasi muda. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, berbagai

pendekatan telah diujicobakan, termasuk integrasi nilai-nilai militer ke dalam sistem pendidikan. Pendidikan berbasis militer dikenal menekankan pada kedisiplinan, loyalitas, ketahanan fisik dan mental, serta kepemimpinan yang kuat. Model ini telah diterapkan di berbagai negara, baik dalam lembaga pendidikan militer murni maupun lembaga sipil yang mengadopsi sebagian pendekatannya.

Namun demikian, penerapan model pendidikan berbasis militer dalam konteks pendidikan umum menimbulkan tantangan tersendiri. Sistem kurikulum nasional cenderung menekankan pada pendekatan humanistik dan konstruktivistik, yang lebih fleksibel dan berbasis pada kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimana manajemen kurikulum berbasis militer dapat dikembangkan, apa saja keunggulannya dan kelemahannya, serta bagaimana tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi.

Pendidikan berbasis militer dalam konteks sistem pendidikan Indonesia seringkali dipandang sebagai upaya untuk menanamkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan

semangat kebangsaan pada peserta didik. Meskipun bukan bagian dari kurikulum utama secara nasional, pendekatan ini telah diterapkan dalam berbagai bentuk, seperti dalam pendidikan karakter, kegiatan Pramuka, pelatihan baris-berbaris, atau dalam lembaga-lembaga pendidikan tertentu seperti SMA Taruna Nusantara atau pesantren yang bekerja sama dengan TNI. Urgensi dari pendekatan ini terlihat dalam upaya negara untuk membentuk generasi muda yang tangguh secara mental dan fisik, disiplin, serta memiliki loyalitas terhadap bangsa dan negara di tengah tantangan globalisasi dan dekadensi moral.

Menurut Nasution (2017) dalam jurnal *Pendidikan Karakter dan Disiplin*, pendidikan berbasis militer dapat menjadi alternatif dalam menanggulangi krisis karakter yang melanda generasi muda. Ia menyebutkan bahwa nilai-nilai militeristik seperti loyalitas, kedisiplinan, dan keteguhan hati mampu membentuk karakter pelajar yang tahan terhadap tekanan dan mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Di tengah meningkatnya kasus perundungan,

penyalahgunaan narkoba, serta menurunnya rasa nasionalisme, pendekatan militer menjadi penting untuk mengimbangi pendidikan kognitif yang cenderung mengesampingkan aspek afektif dan psikomotorik.

Lebih lanjut, pendidikan berbasis militer juga mendukung upaya bela negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Pasal 4 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara melalui berbagai jalur, termasuk pendidikan. Oleh karena itu, model pendidikan yang mengadopsi sistem pelatihan militer secara terbatas dan terukur dianggap mampu memperkuat ketahanan nasional melalui pembentukan karakter warga negara sejak dini.

Namun demikian, implementasi pendidikan berbasis militer perlu dilakukan secara kontekstual dan tidak represif. Seperti dikemukakan oleh Winarno Surakhmad (2019) dalam kajian *Pendidikan Demokratis dan Kedisiplinan Positif*, pendekatan militeristik yang terlalu kaku dan

otoriter dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip pendidikan yang humanis dan partisipatif. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pendidikan untuk mengadopsi nilai-nilai positif dari militer, seperti disiplin dan tanggung jawab, tanpa mengorbankan kebebasan berpikir dan ekspresi peserta didik.

Manajemen kurikulum merupakan proses sistematis yang melibatkan serangkaian langkah strategis demi memastikan kurikulum berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Menurut Oliva (2009), manajemen kurikulum tidak hanya berhenti pada penyusunan dokumen kurikulum semata, tetapi mencakup proses yang lebih luas dan berkelanjutan. Proses ini dimulai dari perencanaan, yaitu tahapan menentukan visi, misi, tujuan, hingga kompetensi yang ingin dicapai oleh peserta didik. Perencanaan ini bersifat fundamental karena menjadi dasar bagi seluruh komponen dalam sistem pendidikan, mulai dari pemilihan materi hingga pendekatan pedagogis yang digunakan.

Tahapan pelaksanaan kurikulum merupakan bentuk konkret dari rencana yang telah disusun sebelumnya. Dalam praktiknya,

pelaksanaan kurikulum mencakup penyampaian materi oleh pendidik kepada peserta didik melalui metode dan strategi pembelajaran yang telah dirancang. Peran guru sangat sentral pada tahap ini, karena mereka bertugas menerjemahkan dokumen kurikulum ke dalam pembelajaran nyata di kelas. Keberhasilan pelaksanaan sangat bergantung pada kompetensi guru, ketersediaan sarana-prasarana, serta dukungan administratif dari pihak sekolah. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru menjadi hal yang mutlak diperlukan agar proses implementasi berjalan efektif.

Evaluasi menjadi langkah penting dalam manajemen kurikulum karena berfungsi sebagai alat ukur terhadap keberhasilan dan kelemahan pelaksanaan kurikulum. Evaluasi ini bisa dilakukan secara formatif dan sumatif, serta mencakup berbagai aspek mulai dari pencapaian hasil belajar siswa, efektivitas metode pembelajaran, hingga relevansi materi ajar. Hasil evaluasi ini sangat krusial sebagai dasar pengambilan keputusan dalam tahap pengembangan atau revisi kurikulum. Tanpa evaluasi yang objektif dan

menyeluruh, proses perbaikan kurikulum tidak akan terarah dan berisiko mengulangi kesalahan yang sama.

Pengembangan kurikulum merupakan proses berkelanjutan yang menyesuaikan isi dan pendekatan pendidikan dengan kebutuhan zaman, perkembangan teknologi, serta dinamika sosial. Pengembangan ini menuntut adanya fleksibilitas dalam sistem pendidikan agar mampu menanggapi berbagai tantangan eksternal, seperti perubahan standar nasional pendidikan, kebutuhan industri, atau fenomena global. Oleh karena itu, kurikulum harus dirancang sebagai dokumen yang hidup (*living document*) yang terus ditinjau dan diperbaiki secara periodik. Dalam hal ini, inovasi menjadi kunci untuk menciptakan kurikulum yang adaptif dan relevan.

Manajemen kurikulum yang efektif memerlukan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan seperti guru, kepala sekolah, pengawas, orang tua, bahkan siswa. Kolaborasi ini harus ditopang oleh kepemimpinan pendidikan yang visioner dan komunikatif, yang mampu menjembatani kepentingan berbagai pihak. Selain itu, sistem monitoring

dan evaluasi yang terstruktur perlu dikembangkan untuk memastikan implementasi kurikulum berjalan sesuai standar dan mendeteksi masalah sejak dini.

Sementara itu, model pendidikan berbasis militer merupakan pendekatan yang mengadopsi nilai, struktur, dan praktik khas militer ke dalam sistem pendidikan formal atau nonformal. Model ini tidak selalu identik dengan pelatihan tempur, melainkan berfokus pada pembentukan karakter yang kuat melalui penanaman disiplin, tanggung jawab, kepemimpinan, dan loyalitas. Menurut Green (2015), pendekatan ini memanfaatkan struktur komando militer yang terorganisasi rapi serta rutinitas yang ketat untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendorong pembentukan watak dan pengendalian diri. Dalam banyak kasus, pendidikan berbasis militer juga menekankan pentingnya keteraturan, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan sebagai fondasi utama pembinaan peserta didik.

Salah satu karakteristik utama dari model ini adalah penegakan disiplin yang tinggi melalui aturan-aturan yang ketat dan konsisten. Disiplin dalam konteks militer tidak

hanya mencakup ketepatan waktu dan ketaatan terhadap perintah, tetapi juga berkaitan dengan etos kerja, pengendalian emosi, dan ketahanan terhadap tekanan. Hal ini sejalan dengan pendapat Snider dan Matthews (2005), yang menyatakan bahwa militer sebagai institusi sosial menanamkan disiplin bukan untuk mengekang kebebasan individu, tetapi untuk memungkinkan individu berperilaku secara konsisten dalam menghadapi tantangan. Dalam pendidikan, pola ini diterapkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang tertib dan terfokus, yang diyakini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan produktivitas siswa.

Selain disiplin, struktur hierarki dan sistem komando yang jelas juga menjadi ciri khas pendidikan berbasis militer. Setiap individu dalam sistem ini mengetahui posisinya dalam struktur sosial dan tanggung jawab yang melekat padanya. Hal ini menciptakan sistem pertanggungjawaban yang kuat dan meningkatkan keterampilan kepemimpinan secara berjenjang. Studi oleh Basham (2008) menunjukkan bahwa sistem hierarki dalam pendidikan militer melatih siswa untuk tidak hanya taat, tetapi juga

mampu mengambil keputusan dalam konteks tanggung jawab kolektif. Dalam konteks sekolah, hal ini bisa diterapkan melalui pengelompokan siswa dalam unit-unit kecil seperti regu atau tim, yang masing-masing dipimpin oleh seorang ketua dengan tanggung jawab tertentu.

Ketahanan fisik dan mental merupakan aspek lain yang sangat ditekankan dalam model ini. Peserta didik didorong untuk menjalani pelatihan fisik rutin, yang bertujuan membentuk tubuh yang bugar dan kemampuan bertahan dalam kondisi sulit. Latihan semacam ini dianggap mampu memperkuat ketahanan psikologis siswa, seperti ketekunan, daya juang, dan pengelolaan stres. Menurut penelitian oleh Winslow (1998), pelatihan militer seringkali menjadi sarana efektif untuk membentuk karakter karena menggabungkan tekanan fisik dan mental dalam konteks yang terstruktur. Dalam konteks pendidikan sipil, latihan ini bisa berupa kegiatan luar ruang seperti perkemahan, long march, atau simulasi krisis, yang dilengkapi dengan refleksi pembelajaran karakter.

Penerapan model ini juga mulai terlihat dalam beberapa institusi sipil,

seperti sekolah berasrama, akademi kepemimpinan, atau sekolah dengan program khusus ketarunaan. Di Indonesia, misalnya, sekolah-sekolah semi-militer seperti Taruna Nusantara atau SMA Pradita Dirgantara mengintegrasikan pendekatan ini untuk membentuk peserta didik yang unggul secara akademik dan tangguh secara mental. Model ini juga banyak diadopsi dalam lembaga pelatihan kepemimpinan, baik di sektor pendidikan maupun korporasi. Meski demikian, implementasinya harus disesuaikan dengan konteks dan usia peserta didik agar tidak menimbulkan tekanan psikologis yang berlebihan atau resistensi terhadap sistem.

Namun, pendekatan ini juga memiliki tantangan dan kritik, terutama terkait kemungkinan mengekang kreativitas atau menekan kebebasan berpikir peserta didik. Beberapa pakar pendidikan berpendapat bahwa pendekatan yang terlalu kaku dapat mengurangi ruang ekspresi individual dan inovasi. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan antara penegakan disiplin dan pemberdayaan siswa untuk berpikir kritis serta mandiri. Seperti dikatakan oleh Freire (2005), pendidikan seharusnya membebaskan, bukan

menindas. Maka, model pendidikan berbasis militer sebaiknya diintegrasikan secara selektif dan kontekstual, mengutamakan nilai-nilai positifnya seperti ketangguhan, etika, dan kepemimpinan, tanpa mengabaikan pentingnya dialog dan kebebasan intelektual.

Pendidikan karakter menurut Thomas Lickona (1991) merupakan proses sadar yang bertujuan membantu peserta didik memahami, menghargai, dan mempraktikkan nilai-nilai moral yang esensial untuk kehidupan bermasyarakat. Lickona menekankan bahwa karakter yang baik tidak dibentuk secara spontan, tetapi melalui pendidikan yang disengaja, sistematis, dan konsisten. Nilai-nilai inti seperti integritas, tanggung jawab, dan rasa hormat merupakan pilar utama dalam kerangka pendidikan karakter. Menurutnya, pendidikan yang hanya menekankan aspek kognitif tanpa membentuk aspek moral dan afektif akan melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual tetapi miskin secara etika (Lickona, 1991).

Integritas, sebagai komponen utama karakter, berkaitan dengan keselarasan antara kata dan perbuatan, serta kejujuran dalam

berbagai situasi. Dalam pendekatan militer, integritas juga menjadi fondasi utama yang menentukan kepercayaan antaranggota dalam satuan. Pendidikan militer melatih peserta untuk tetap teguh pada prinsip, bahkan dalam kondisi sulit. Ketika nilai ini diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan karakter di sekolah, siswa dididik untuk jujur dalam akademik, konsisten dalam perilaku, serta dapat dipercaya oleh lingkungan sekitarnya. Hal ini menjadikan integrasi nilai militer dan karakter sebagai pendekatan yang saling menguatkan, bukan bertentangan.

Tanggung jawab, baik terhadap diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan, juga merupakan nilai sentral dalam pendidikan karakter dan militer. Dalam sistem militer, tanggung jawab bukan hanya konsep normatif, melainkan bagian integral dari kehidupan sehari-hari yang dilatih melalui tugas, rotasi jabatan, dan konsekuensi atas setiap tindakan. Nilai ini sangat relevan dalam konteks pendidikan karakter, terutama dalam mendorong siswa untuk tidak hanya berprestasi, tetapi juga memiliki kesadaran sosial dan etika. Siswa yang dibentuk dengan rasa tanggung jawab akan mampu mandiri, berpikir

jauh ke depan, dan tidak mudah menyalahkan orang lain saat menghadapi kesulitan.

Rasa hormat, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, adalah dimensi moral yang tak terpisahkan dalam pendidikan karakter dan sangat dijunjung tinggi dalam dunia militer. Dalam tradisi militer, penghormatan terhadap atasan, rekan, aturan, dan simbol-simbol nasional menjadi praktik sehari-hari yang menumbuhkan sikap rendah hati dan disiplin. Integrasi nilai ini ke dalam pendidikan karakter dapat membentuk siswa yang tidak hanya sopan secara formal, tetapi juga mampu menghargai perbedaan, menghormati otoritas, serta menunjukkan empati dalam berinteraksi sosial. Sikap hormat adalah kunci dalam menciptakan budaya sekolah yang sehat dan kolaboratif.

Dengan menggabungkan nilai-nilai karakter seperti yang dikembangkan oleh Lickona dengan etos militer yang berdisiplin dan sistematis, terbentuklah pribadi peserta didik yang kuat secara moral dan tangguh secara mental. Dalam konteks dunia modern yang penuh tantangan seperti era digital, disrupsi teknologi, dan krisis nilai, pendidikan

semacam ini menjadi sangat relevan. Siswa dituntut tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjaga integritas, bertanggung jawab atas tindakannya, dan berinteraksi dengan penuh hormat dalam masyarakat yang majemuk. Pendidikan karakter berbasis nilai militer tidak berarti kaku dan represif, tetapi justru memperkuat daya tahan moral anak dalam menghadapi tekanan globalisasi.

Namun, pendekatan ini harus dilakukan secara adaptif, mempertimbangkan usia dan kebutuhan perkembangan psikologis peserta didik. Seperti yang disampaikan oleh Nucci dan Narvaez (2008), pendidikan moral yang efektif harus kontekstual, demokratis, dan mendukung pembelajaran reflektif. Maka, nilai-nilai militer perlu difilter dan disesuaikan agar tidak menimbulkan kesan otoriter, tetapi tetap menyampaikan pesan penting tentang kedisiplinan, etika, dan pengabdian. Melalui integrasi ini, pendidikan karakter tidak hanya membentuk siswa yang baik secara moral, tetapi juga tangguh dan siap menjadi pemimpin masa depan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang berarti peneliti berusaha memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengumpulan dan analisis data non-numerik (Miles, Huberman & Saldaña, 2014). Dalam pendekatan deskriptif-analitis, peneliti tidak hanya menggambarkan apa yang terjadi, tetapi juga menganalisis hubungan antar fenomena dan menarik makna dari konteks yang kompleks. Pendekatan ini cocok untuk topik seperti pendidikan berbasis militer, yang melibatkan dimensi struktural, nilai, dan dinamika sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.

Data diperoleh melalui studi pustaka (*library research*), yaitu pengumpulan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, dan laporan pelaksanaan program. Teknik ini penting dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti membangun pemahaman konseptual dan kontekstual yang kuat (Zed, 2008). Dalam konteks ini, peneliti mengkaji literatur akademik untuk memahami teori pendidikan militer dan semi-militer, menganalisis

kebijakan kurikulum dari institusi terkait, serta melihat bagaimana program-program serupa diterapkan di berbagai negara. Ini menunjukkan bahwa penelitian ini bersifat komparatif dan kontekstual, berusaha melihat keberagaman praktik dan mengambil pelajaran dari pelaksanaan di berbagai tempat.

Analisis data dilakukan dengan mengategorikan aspek-aspek manajemen kurikulum dan mengidentifikasi tantangan implementasi dari sudut pandang pedagogis, psikologis, dan sosial. Manajemen kurikulum mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan, yang dalam konteks pendidikan semi-militer harus disesuaikan dengan nilai-nilai kedisiplinan, ketahanan fisik, dan kepemimpinan (Print, 1993). Dari sisi pedagogis, tantangan bisa muncul dalam metode pengajaran yang cenderung otoriter, yang mungkin bertentangan dengan prinsip pedagogi partisipatif. Dari sisi psikologis, tekanan militeristik dapat berdampak pada kesehatan mental siswa, terutama jika tidak disesuaikan dengan tahapan perkembangan mereka (Santrock, 2011). Sementara dari sisi sosial, program semacam ini

dapat memengaruhi interaksi sosial dan pembentukan identitas siswa. Dengan menganalisis dimensi-dimensi tersebut, penelitian ini berupaya memberikan gambaran menyeluruh tentang implikasi pendidikan berbasis militer dalam konteks sekolah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Model manajemen kurikulum berbasis militer pada dasarnya mengadopsi prinsip-prinsip militer dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Struktur kurikulumnya dirancang rigid dan sistematis, artinya setiap kegiatan belajar diatur secara ketat, berjenjang, dan tidak memberikan banyak fleksibilitas. Dalam konteks ini, kurikulum diarahkan tidak hanya pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, seperti tanggung jawab, disiplin, dan kemandirian, yang menjadi nilai dasar dalam tradisi militer. Menurut Mulyasa (2013), pembentukan karakter dalam pendidikan tidak cukup hanya dengan pengajaran nilai, melainkan juga melalui pembiasaan dan pembentukan lingkungan yang mendukung, seperti yang dilakukan

dalam sistem pendidikan semi-militer. Dengan demikian, model ini menjadi wadah yang memungkinkan penanaman karakter dilakukan secara konsisten dan terstruktur.

Lebih lanjut, jadwal kegiatan belajar dalam pendidikan berbasis militer dirancang ketat dan padat, mencakup aktivitas fisik, latihan baris-berbaris, serta pelatihan kepemimpinan dan kerja tim. Hal ini mirip dengan praktik di lembaga-lembaga seperti Taruna Nusantara atau SMA Pradita Dirgantara, di mana waktu siswa diatur dari bangun pagi hingga istirahat malam. Tujuannya adalah membentuk ketahanan fisik dan mental, serta melatih kemampuan mengambil keputusan dalam tekanan, yang esensial dalam kepemimpinan. Sejalan dengan itu, evaluasi dalam kurikulum ini tidak hanya melihat aspek akademik, tetapi juga mencakup ketaatan terhadap aturan, performa fisik, serta sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari (Kosasih, 2020). Evaluasi berjenjang dilakukan secara periodik oleh tim pengasuh atau pembina, yang umumnya berasal dari latar belakang militer atau telah mendapatkan pelatihan khusus.

Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa model pendidikan berbasis militer memiliki efektivitas tertentu, terutama dalam menciptakan suasana tertib, membentuk perilaku disiplin, dan meningkatkan kepemimpinan siswa. Misalnya, penelitian oleh Suryadi (2020) tentang sekolah semi-militer di Jawa Barat menemukan bahwa siswa menunjukkan tingkat kemandirian dan ketahanan stres yang lebih tinggi dibandingkan siswa dari sekolah reguler. Mereka juga memiliki kemampuan komunikasi dan kerja tim yang lebih kuat, karena terbiasa bekerja dalam kelompok dan mengikuti instruksi dengan baik. Namun, beberapa kritik juga muncul terkait tekanan psikologis dan keterbatasan ruang ekspresi siswa, yang bisa berdampak negatif jika tidak dikelola secara proporsional (Rohman, 2021). Oleh karena itu, meskipun model ini memiliki manfaat dalam pembentukan karakter, penting bagi pihak sekolah untuk menyeimbangkan aspek kedisiplinan dengan pendekatan pedagogis yang humanis.

Sementara itu, pendekatan militer umumnya menekankan pada struktur komando, kepatuhan mutlak,

dan penyeragaman perilaku. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar pendidikan yang menghargai partisipasi aktif, pengakuan terhadap keberagaman, serta kebebasan berpikir dan berekspresi. Dalam konteks pendidikan, anak tidak hanya objek yang diarahkan, tetapi juga subjek pembelajaran yang memiliki aspirasi dan potensi individual (Tilaar, 2004). Ketika pendekatan militer diterapkan secara kaku, ada risiko bahwa siswa akan kehilangan ruang untuk berekspresi, berpikir kritis, dan berinovasi, yang justru merupakan keterampilan utama dalam menghadapi tantangan abad ke-21.

Selain kehilangan ruang ekspresi, pendekatan yang terlalu keras dan seragam ini berpotensi menimbulkan tekanan psikologis, terutama jika tidak memperhatikan tahapan perkembangan usia peserta didik. Dalam teori perkembangan psikososial Erik Erikson, misalnya, remaja berada dalam tahap mencari identitas dan otonomi. Jika mereka terus-menerus dikekang dalam sistem yang menuntut kepatuhan mutlak tanpa dialog, maka risiko munculnya tekanan mental, pemberontakan pasif, atau bahkan alienasi sangat besar (Santrock, 2011). Ini diperkuat oleh

temuan penelitian lokal, seperti studi Rohman (2021) yang menunjukkan adanya gejala stres dan kejenuhan pada siswa di sekolah semi-militer yang tidak memiliki mekanisme dukungan psikologis memadai. Selain itu, resistensi masyarakat juga menjadi hambatan. Banyak pihak menilai bahwa sistem ini tidak adaptif terhadap keberagaman latar belakang sosial-budaya siswa dan terlalu menekankan homogenitas nilai dan perilaku.

Untuk menjawab tantangan tersebut, penulis menyarankan perlunya penyesuaian pendekatan militer dengan prinsip-prinsip pedagogis kontekstual. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah *blended approach*, yaitu perpaduan nilai-nilai positif dari pendidikan militer—seperti kedisiplinan, tanggung jawab, dan keberanian—dengan metode pembelajaran partisipatif, reflektif, dan berbasis proyek. Misalnya, penerapan *project-based character education* memungkinkan siswa menginternalisasi nilai melalui pengalaman langsung yang bermakna dan relevan. Pendekatan seperti ini selaras dengan model pendidikan karakter menurut Kemendikbud (2017), yang menekankan integrasi

antara penguatan budaya sekolah, pelibatan keluarga, dan pembelajaran aktif. Di sisi lain, pelatihan kepemimpinan yang kolaboratif, alih-alih hierarkis, dapat membantu siswa tumbuh sebagai pemimpin yang empatik dan solutif. Dengan pendekatan adaptif ini, pendidikan berbasis militer tetap bisa dilaksanakan, namun dalam bentuk yang lebih inklusif, manusiawi, dan berorientasi pada pengembangan potensi siswa secara utuh.

D. Kesimpulan

Manajemen kurikulum pendidikan berbasis militer menawarkan potensi besar dalam pembentukan karakter dan peningkatan kualitas kedisiplinan peserta didik. Namun, implementasinya harus dilakukan secara selektif dan adaptif agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pendidikan modern yang humanistik. Kurikulum berbasis militer sangat menekankan pada nilai disiplin, tanggung jawab, dan integritas, yang memang penting dalam membentuk kepribadian peserta didik. Beberapa lembaga pendidikan semi-militer seperti SMA Taruna Nusantara telah menunjukkan bahwa siswa mampu

berkembang dengan baik dalam hal kedisiplinan dan etos kerja yang tinggi.

Dengan pendekatan yang sistematis dan pengawasan yang ketat, kurikulum ini mampu membentuk kebiasaan yang mendukung prestasi akademik dan non-akademik. Dalam konteks pendidikan karakter, hal ini sejalan dengan tujuan Kurikulum Merdeka yang menekankan pembentukan profil pelajar Pancasila, terutama dalam dimensi “mandiri” dan “bertanggung jawab”.

Namun, implementasi pendekatan militer tidak bisa dilakukan secara serampangan atau menyalin langsung model pelatihan militer formal ke dalam institusi pendidikan umum. Pendidikan modern bertumpu pada prinsip humanisme, di mana peserta didik dipandang sebagai individu yang unik dan memiliki kebebasan untuk berkembang sesuai potensi dirinya. Oleh karena itu, pendekatan militer perlu diseleksi dan diadaptasi secara hati-hati. Beberapa unsur yang bisa diadopsi antara lain penanaman nilai melalui pembiasaan, pelatihan kepemimpinan berbasis peran (*role-based leadership training*), serta

pembentukan etos kerja melalui struktur kegiatan yang tertib dan bermakna. Di sisi lain, aspek seperti kepatuhan mutlak, hukuman fisik, atau penghilangan ruang ekspresi siswa jelas bertentangan dengan prinsip inklusivitas dan partisipasi aktif yang dijunjung dalam sistem pendidikan nasional

Dalam hal ini, peran pemangku kebijakan, pendidik, dan masyarakat menjadi sangat penting untuk menciptakan pendekatan kurikulum yang seimbang antara ketegasan dan fleksibilitas. Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu merumuskan regulasi yang memungkinkan pengembangan model pendidikan karakter berbasis semi-militer yang tetap berada dalam koridor pedagogis yang sehat. Guru dan tenaga pendidik harus dibekali dengan pelatihan khusus agar mampu menerjemahkan nilai-nilai militer secara edukatif dan komunikatif. Masyarakat dan orang tua juga perlu dilibatkan dalam perencanaan dan evaluasi agar sistem ini benar-benar kontekstual dan tidak memunculkan resistensi sosial. Dengan demikian, manajemen kurikulum berbasis militer dapat menjadi strategi pendidikan karakter

yang efektif, tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip demokrasi, inklusivitas, dan penghargaan terhadap keragaman peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Basham, K. L. (2008). *Transformative Leadership in Military Education*. *Military Review*, 88(5), 96–103.
- Freire, P. (2005). *Pedagogy of the Oppressed*. Continuum International Publishing Group.
- Green, J. (2015). *Military Education and Character Development*. *Journal of Educational Administration and History*, 47(2), 145–160.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Penguatan Pendidikan Karakter (PPK): Konsep dan Panduan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Kosasih, D. (2020). *Manajemen Pendidikan Karakter di Sekolah Semi-Militer*. Bandung: Alfabeta.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage.
- Mulyasa, E. (2013). *Manajemen Kurikulum*. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. (2017). *Pendidikan Karakter dan Disiplin dalam Perspektif Militer*. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*.
- Print, M. (1993). *Curriculum Development and Design*. Allen & Unwin.
- Rohman, A. (2021). "Dampak Psikologis Pendidikan Semi-Militer terhadap Siswa SMA". *Jurnal Psikologi Pendidikan Indonesia*, 3(1), 33–45.
- Santrock, J. W. (2011). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Snider, D. M., & Matthews, L. J. (2005). *The Future of the Army Profession*. McGraw-Hill.
- Surakhmad, W. (2019). *Pendidikan Demokratis dan Kedisiplinan Positif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suryadi, D. (2020). "Efektivitas Pendidikan Semi-Militer terhadap Pembentukan Karakter Siswa". *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(2), 145–158.
- Tilaar, H. A. R. (2004). *Manifesto Pendidikan Nasional*. Kompas.
- UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
- Winslow, D. (1998). *Misplaced Loyalties: The Role of Military Culture in the Breakdown of Discipline in Peace Operations*. *Canadian Review of Sociology*, 35(3), 345–367.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.